BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Perusahaan

Perjalanan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten menyimpan sejarah cukup panjang. Awal kelistrikan di Bumi Parahyangan sudah ada semenjak Pemerintah Kolonial Belanda masih bercokol di tataran tanah Sunda. Di tahun 1905, di Jawa Barat khususnya kota Bandung, berdiri perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan publik. Nama perusahaan itu *Bandungsche Electriciteit Maatschaappij* (BEM)**.** Dalam perjalanannya, BEM pada tanggal 1 Januari 1920 berubah menjadi Perusahaan Perseroan menjadi *Gemeenschapplijk Electriciteit Bedrijf Voor Bandoeng* (GEBEO) yang pendiriannya dikukuhkan melalui akte notaris Mr. Andriaan Hendrik Van Ophuisen dengan Nomor: 213 pada tanggal 31 Desember 1949. Setelah kekuasaan penjajahan beralih ke tangan Pemerintah Jepang, di antara rentah waktu 1942 - 1945, pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh *Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha* dengan wilayah kerja di seluruh Pulau Jawa.

Setelah Indonesia merdeka, tahun 1957 menjadi awal penguasaan pengelolaan penyediaan tenaga listrik di seluruh tanah air yang ditangani langsung oleh Pemerintah Indonesia. 27 Desember 1957, GEBEO diambil alih oleh Pemerintah Indonesia yang kemudian dikukuhkan lewat Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 1958 j.o. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1959. Selanjutnya, di tahun 1961 melalui Peraturan Pemerintah No. 67 dibentuk **Badan Pimpinan**

Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. Sejalan dengan itu, PLN Bandung pun berubah menjadi **PLN Exploitasi XI** sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat, di luar DKI Jaya dan Tangerang.

Pada tahun 1970an dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara yang menyebutkan status PLN menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. Kemudian, berdasarkan Pengumuman PLN Exploitasi XI No. 05/DIII/Sek/1975 tanggal 14 Juli 1975, PLN Exploitasi XI diubah namanya menjadi **Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat**.

Memasuki era 1990-an, dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 1994 pada tanggal 16 Juni 1994, Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama **PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat** sejak tanggal 30 Juli 1994.

Untuk memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan kelistrikan yang dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, maka keluarlah Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 28.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001 yang menjadi landasan hukum perubahan nama PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat menjadi **PT PLN (Persero) Area Bisnis Distribusi Jawa Barat.**

Pada akhirnya, dengan mengacu pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 120.K/010/DIR/2002 tanggal 27 Agustus 2002, PT PLN (Persero) Area Bisnis Distribusi Jawa Barat berubah lagi namanya menjadi **PT PLN (Persero)**

Distribusi Jawa Barat dan Banten, di mana wilayah kerjanya meliputi Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten, hingga saat ini.

2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Tempat dari PT.PLN (Persero) UPJ Rengasdengklok itu sendiri beralamat di Jl.Raya Rengasdengklok No.17 Karawang 41352. Untuk PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, Luas wilayah kerja menjangkau lebih dari 42.196 km² yang meliputi Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten, kecuali Tangerang. Jumlah konsumen yang harus dilayani mencapai lebih dari 6,2 juta pelanggan yang tersebar di seluruh pemerintah kota dan kabupaten. Beberapa tahun yang lalu PT PLN DJBB mengeluarkan program Restrukturisasi. Salah satunya adalah Restrukturisasi korporat yang merubah bentuk organisasi menjadi lebih demokrat dan terfokus.

Berikut sebutan baru PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Provinsi Banten

- Area Pelayanan Jaringan (APJ)

  Adalah Area kerja yang memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan, memberikan dukungan dan koordinasi antar Area Pelayanan dan Area Jaringan yang secara struktur organisatoris berada di bawah kendalinya. APJ ini merupakan perubahan dari sebutan cabang.

- Unit Pelayanan

  Adalah Area kerja dibawah APJ yang menempatkan peran sebagai Fort Liner. Service dalam memberikan pelayanan kepada konsumen yang berkaitan dengan administrasi pelanggan (fungsi pelayanan pelanggan), seperti: pelayanan sambungan baru, penambahan daya, pencatatan meter, penjualan rekening.

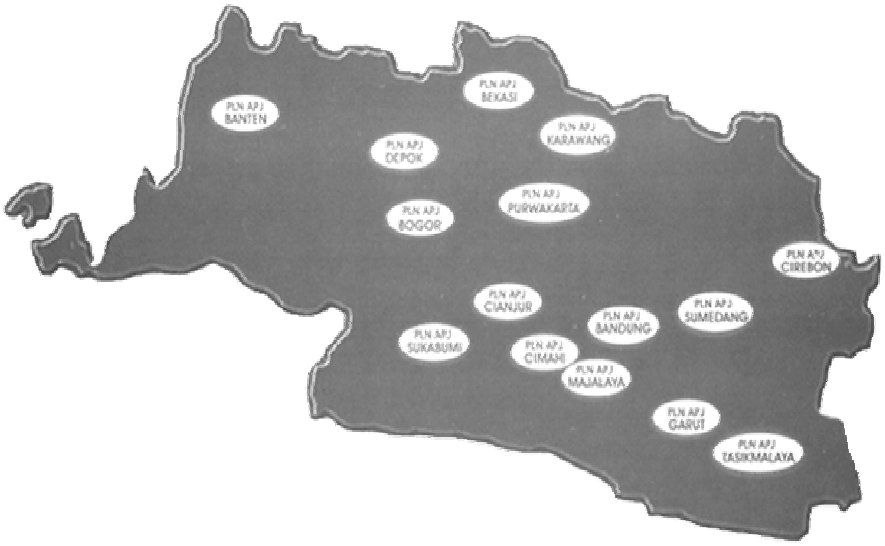
- Area Jaringan

  Merupakan Area kerja dibawah APJ yang menjalankan fungsi pengelolaan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik (fungsi *wiring*) disisi Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR), termasuk dalam menangani gangguan.

Saat ini PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sedang memiliki :

- 15 kantor Area Pelayanan Jaringan (APJ)
- 1 Area Area Pengatur Distribusi (APD)
- 82 Area Pelayanan (UP)
- Dan puluhan Service Point (Kantor Jaga)

UP, UJ dan Service Point menjadi *Front Liner Service* yang langsung berhubungan dengan pelanggan.



Gambar 2.1 Daftar alamat APJ PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Rengasdengklok berkedudukan sebagai kantor cabang pembantu dari PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan (APJ) Karawang, Sedangkan PT. PLN (Persero) APJ Rengasdengklok sendiri mempunyai Kantor Pembantu (KP) yaitu KP Tirtajaya, KP Batujaya, KP Rawamerta, KP Pedes, dan KP Pusaka Jaya.

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Kelistrikan di Indonesia telah ada sebelum tahun 1943, dimulai dari pemakaian untuk perusahaan-perusahaan, perorangan (swasta) milik Belanda. Misalnya perkebunan-perkebunan dan pabrik-pabrik gula. Karena perusahaan kelistrikan untuk umum lebih menguntungkan maka bermunculan perusahaan-perusahaan listrik swasta milik Belanda dan pada waktu itu dalam pendudukan Jepang. Perkembangan perusahaan kelistrikan dibagi menjadi beberapa periode yaitu:

1. Perusahaan listrik dan gas dikuasai oleh pemerintah RI dan dibentuk jawatan listrik dan gas pada tanggal 27 Oktober 1945.
2. Pada tanggal 19 Desember 1948 jawatan listrik dan gas dikuasai oleh Belanda.
3. Pada tahun 1950 pemerintahan RI merebut kembali perusahaan listrik dan gas yang dulu dikuasai oleh koloni dan diganti namanya menjadi jawatan tenaga kecuali milik swasta Belanda.

Periode 1951 – 1966

1. Jawatan tenaga mengelola perusahaan Negara untuk pembangkit tenaga listrik (Penupetel), kemudian diperluas dengan mengelola perusahaan Negara untuk distribusi tenaga listrik (Penuditel)
2. Berdasarkan keputusan presiden No. 163 tanggal 5 Oktober 1953 perusahaan listrik milik perusahaan swasta Belanda yang masa konsensinya telah habis diambil alih (Di Nasionalisasi) dan dimasukan kejawatan tenaga. Pada tanggal 25 September 1958 perusahaan listrik dan gas Belanda di nasionalisasi. Proses ini ditanggani oleh perusahaan-perusahan listrik Negara (P3N).
3. Pada tanggal 25 September 1958jawatan tenaga diubah namanya menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN).
4. Pada tahun 1965, struktur organisasi Perusahaan Listrik Negara diseluruh wilayah Indonesia ditetapkan menjadi 14 kesatuan wilayah dengan cabang sebagai berikut :

a. 12 PLN eksploitasi ditribusi
b. 1 PLN eksploitasi pembangkit
c. PLN gas

5. Pada tahun 1956 dengan peraturan No. 04 / PRT / 1965 P(X) dibagi menjadi :
   a. Perusahaan Listrik Negara (PLN)
   b. Perusahaan Gas Negara (PGN)
6. Dalam struktur organisasi PLN yang baru, ditetapkan 15 kesatuan wilayah eksploitasi, dimana didalamnya masing-masing sektor pembangkitnya.

Periode 1967 – 1994

1. PLN dialihkan ke departemen Pekerjaan Umum dalam Tenaga Listrik (PUTL).
2. Pada tahun 1942 PLN ditetapkan sebagai perusahan umum
3. PLN dialihkan ke departemen pertambangan dan energi dibawah direktorat jenderal ketenagaan.
4. Dirjen ketenagaan diubah menjadi Dirjen Listrik dan Energi Baru (IEG).
5. PLN wilayah eksploitasi XI diubah menjadi PLN Distribusi Jawa Barat.

Periode 1994 – 1998

Dengan adanya peraturan pemerintah RI No. 23 tahun 1964 tanggal 16 Juni 1994 tentang peralihan bentuk perusahaan umum listrik negara Distribusi Jawa Barat menjadi persero maka sejak tanggal 30 juni 1994 sesuai dengan akta pendirian PLN disebut menjadi PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat, yang terdiri

dari 13 cabang, 1 bengkel distribusi, 1 bengkel mesin dan 1 Area pengaturan distribusi. Selain itu PT PLN mempunyai satu kantor pusat wilayah yang disebut PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Cikapundung No. 2 Bandung.

2.4 Bidang Pekerjaan Perusahaan

PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan publik. Secara operasional untuk melayani pelanggan yang tersebar diseluruh Jawa Barat dan Banten, PT. PLN (persero) memiliki 15 kantor Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) dan 1 Kantor Area Pengatur Distribusi (APD)**.**

Kantor APJ memikul tanggung jawab operasional untuk mendistribusikan tenaga listrik, melayani pelanggan dan penjaga keandalan pasokan listrik di masing-masing wilayah pengusahaannya. Sedangkan kantor APD memegang tanggung jawab untuk mengendalikan dan mengatur pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik pelanggan dan masyarakat khususnya diwilayah Bandung raya.

Untuk menjual produknya (energi listrik), PLN tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan harga jual produknya, melainkan ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden (KEPPRES). Harga jual tenaga listrik untuk tahun 2003 ditetapkan melalui KEPPRES No. 89 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Tarif Dasar Listrik yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2003.

2.5 Bidang Pekerjaan Divisi Tempat Kerja Praktek

Pada Bidang Pekerjaan Divisi / Departemen Tempat Kerja Praktek, penulis ditempatkan pada Divisi Jaringan Local Area Network (LAN) yang bertugas mengatur dan memperbaiki jaringan komputer. Dibagian LAN juga mempunyai tugas yang mengawasi UPJ – UPJ (Unit Pelayanan Jaringan) yang berada di bawahnya, dalam artian UPJ yang berada di dalam naungan dan pengawasan PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan jaringan (UPJ) Rengasdengklok.

2.6 Struktur Organisasi Perusahaan

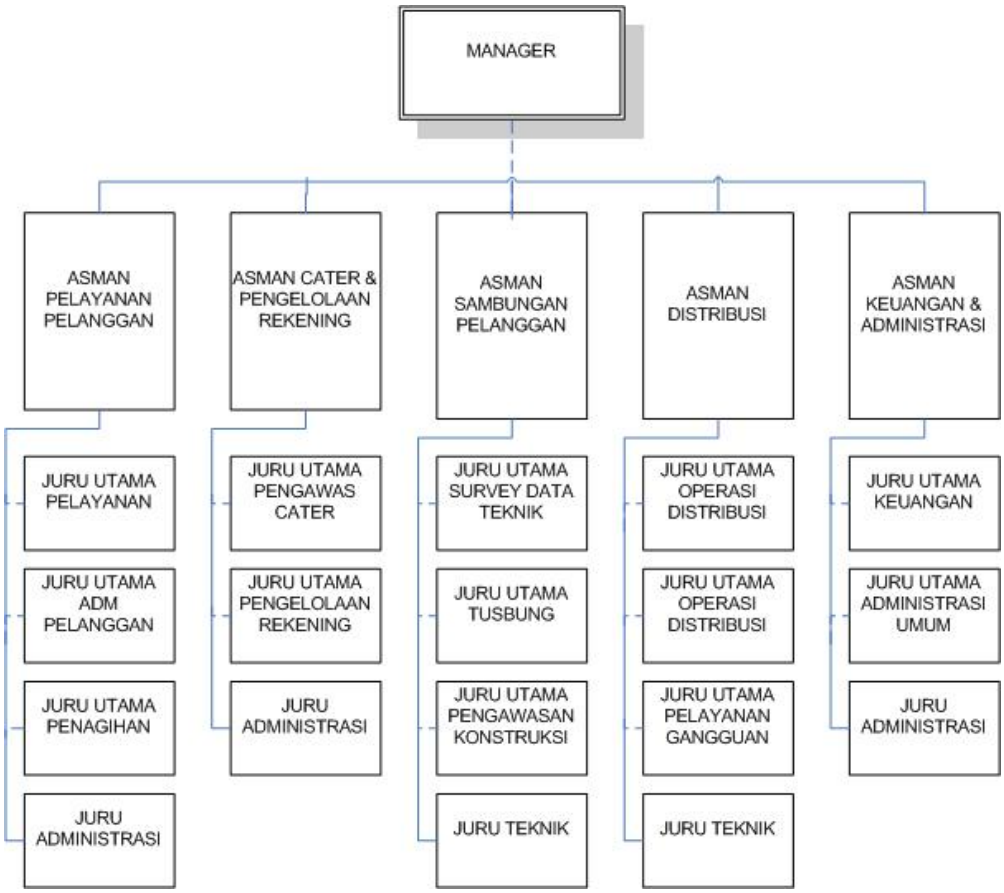
Struktur Organisasi merupakan suatu kerangka dalam manajemen perusahaan/organisasi agar suatu perusahaan/organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan pertama kali berdirinya perusahaan/organisasi tersebut. Struktur organisasi memuat tatanan kerja yang ada di perusahaan tersebut yang menyangkut tugas, tanggung jawab dan wewenang. Semuanya ada agar tercipta hubungan yang baik yang lebih dinamis dan masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri juga mempunyai rasa hormat terhadap yang lain baik itu berkedudukan diatas, dibawah atau setingkat. Tidak berjalannya struktur organisasi dengan baik akan mengarahkan perusahaan tersebut pada kehancuran maka dari itu struktur organisasi merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan.

Struktur organisasi pada PT.PLN (Persero) UPJ Rengasdengklok itu sendiri yaitu:

1. Manager

2. Asman Pelayanan Pelanggan terdiri dari :
    a. Juru Utama Pelayanan
    b. Juru Utama Administrasi Pelanggan
    c. Juru Utama Penagihan
    d. Juru Administrasi
3. Asman Cater dan Pengelolaan Rekening terdiri dari :
    a. Juru Utama Pengawas Cater
    b. Juru Utama Pengelolaan Rekening
    c. Juru Administrasi
4. Asman Sambungan Pelanggan terdiri dari :
    a. Juru Utama Survey Data Teknik
    b. Juru Utama TusBung
    c. Juru Utama Pengawasan Konstruksi
    d. Juru Teknik
5. Asman Distribusi terdiri dari :
    a. Juru Utama Operasi Distribusi
    b. Juru Utama Pemeliharaan Distribusi
    c. Juru Utama Pelayanan Gangguan
    d. Juru Teknik
6. Asman Keuangan dan Administrasi terdiri dari :
    a. Juru Utama Keuangan
    b. Juru Utama Administrasi Umum
    c. Juru Administrasi

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.2. Struktur Organisasi

PT.PLN (Persero) UPJ Rengasdengklok